

Peranan Politik Gerakan Perempuan Dari Masa Ke Masa (Studi : Tentang Sejarah Organisasi Pkk Di Indonesia)

Amaliatulwalidain¹⁾, Novia Kencana²⁾

¹⁾²⁾Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri
Jl Jend. Sudirman No. 629 KM. 4 Palembang
Email : Amaliatulwalidain@uigm.ac.id¹⁾, Kencananovia@uigm.ac.id²⁾

Abstract

Analyzing the role of Indonesian women's politics in political structures in Indonesia is one part of a long history that cannot be denied that women also contribute to the distribution of power. The position and political role of women in Indonesia's political structure today is certainly closely related to gender ideas that are built in a conceptual framework that is understood by society in general. Conceptually gender ideas that are understood by Indonesian society in general and the whole are in fact built in uniform arguments and reflected in several women's movements which are influenced in the political structure and the power of the ruling political regime. The presence of the PKK organization during the New Order was a manifestation of the regime's work on the control of the repressed women's movement and on political rules and interests that were adjusted to the New Order's political policies which were co-opted through its role only in the domestic domain as good wives and mothers by adopting five central role, namely: first, women as wives with husbands, second, women as mothers seekers, third, women as household economic regulators, fourth, women as breadwinners, fifth, women as members of society.

Keywords: Political Role, Women's Movement, PKK History

Abstrak

Menganalisa peran politik perempuan Indonesia dalam struktur politik di Indonesia merupakan salah satu bagian sejarah panjang yang tidak bisa dipungkiri bahwa kaum perempuan juga berkontribusi pada distribusi kekuasaan. Posisi dan peran politik perempuan dalam struktur politik Indonesia dewasa ini tentu sangat terkait dengan gagasan-gagasan gender yang dibangun dalam kerangka konseptual yang di pahami masyarakat secara umum. Secara konseptual gagasan-gagasan gender yang dipahami masyarakat Indonesia secara umum dan keseluruhan nyatanya dibangun dalam argumentasi yang seragam dan tercermin dalam beberapa gerakan perempuan yang terpengaruh dalam struktur politik serta kekuasaan rezim politik yang berkuasa. Hadirnya organisasi PKK pada masa Orde Baru merupakan manifestasi dari bekerjanya rezim terhadap penguasaan gerakan perempuan yang direpresi dan pada aturan dan kepentingan politik yang disesuaikan dengan kebijakan politis Orde Baru yang dikooptasi melalui perannya hanya dibatasi pada wilayah domestik sebagai istri dan ibu yang baik dengan mengadopsi pada lima peran sentral, yaitu : pertama, perempuan sebagai istri pedamping suami, kedua, perempuan sebagai pencari ibu, ketiga, wanita sebagai pengatur ekonomi rumah tangga, keempat, wanita sebagai pencari nafkah, kelima, wanita sebagai anggota masyarakat.

Kata kunci : Peranan Politik, Gerakan Perempuan, Sejarah PKK

1. Pendahuluan

Posisi dan peran politik perempuan dalam struktur politik Indonesia dewasa ini tentu sangat terkait dengan gagasan-gagasan gender yang dibangun dalam kerangka konseptual yang di pahami masyarakat secara umum. Secara konseptual gagasan-gagasan gender yang dipahami masyarakat Indonesia secara umum dan keseluruhan nyatanya dibangun dalam argumentasi yang seragam, umumnya masyarakat mengasumsikan bahwa konstruksi gender hanya dilihat dari fungsi seksual dan biologis semata (jenis kelamin), tapi tidak dilihat dari struktur peran dan posisi gender dalam hubungan sosial. Dalam konstruksi gender yang terbangun dari argumentasi dan analisis berdasarkan jenis kelamin, biasanya perempuan selalu menjadi bagian 'gender yang tersubordinasi karena jenis kelaminnya sendiri. Akibatnya perempuan dianggap sebagai 'warga kelas dua' dan merasa layak untuk 'dirumahkan' serta tidak berhak untuk mempunyai peran dan posisi apapun dalam kehidupan diluar rumah. Tidak bisa dipungkiri bahwa konstruksi gender semacam itu sangat terkait erat dengan sistem politik dari gagasan-gagasan bangsa kolonial Belanda pada abad ke 17, yang memberangus konstruksi gender kuno serta menghilangkan praktik-praktik kesetaraan gender yang telah ada di Nusantara.

Tentunya dari pada itu dalam menganalisis secara mendalam tentang peran politik perempuan dalam struktur politik di Indonesia, secara tidak langsung, tidak bisa dipisahkan dari sejarah konstruksi gender dalam sejarah dan budaya di Indonesia, bahkan konstruksi gender dalam sejarah dan budaya di Indonesia, telah hadir sebelum negara hadir. Fakta sejarah mengungkap bahwa konstruksi gender di Nusantara pada setiap etnis yang berbeda memiliki tradisi gender yang beragam, beberapa diantaranya seperti di Sumatera Barat, etnis Minangkabau mempunyai tradisi gender tersendiri tentang kepemilikan *property* (materi) serta pembagian warisan yang didasarkan pada garis keturunan ibu (sistem matrilineal), bahwa harta hanya akan jatuh pada anak-anak perempuan, sedangkan laki-laki dalam konstruksi gender di Minangkabau bisa memiliki basis kekuatan materi apabila mendapat persetujuan yang diberikan dari adat dan keluarga melalui perwalian dari paman laki-laki (*Ninik Mamak*) serta mendapat persetujuan dari saudara-saudara perempuan pemilik *property* (Blackburn, 2004,p.9).

Hampir senada dengan konstruksi gender pada masyarakat di Minangkabau, di Sumatera Selatan, tepatnya pada masyarakat suku Semende Darat Tengah, secara adat istiadat pengelolaan *property* (materi) menyangkut sawah, rumah, tebat (kolam ikan, jika ada) dan kebun kopi akan diwarisi kepada anak perempuan tertua atau disebut dengan *Tunggu Tumbai*. Secara adat paman laki-laki (*Meraje*) menjadi penentu untuk menetapkan seorang *Tunggu Tumbai* yang diambil dari anak perempuan tertua didalam keluarga. *Tunggu Tumbai* selaku anak perempuan tertua berkewajiban untuk menjaga, mengelola serta mengurus *property* tersebut, tetapi tidak boleh menjual atau mengalih

fungsikannya. *Tunggu Tumbai* menjadi simbol kekuasaan dari perempuan yang berkuasa mengelolah harta yang ada, karena 'sawah dan rumah dalam masyarakat adat Sumende memiliki makna simbolis sebagai sumber kekuasaan dan posisi seseorang (Yenrizal, Agus Rahmat, Atwar Bajari & Johan Iskandar, 2015,p. 291)

Atensi mengenai kesetaraan gender di Nusantara juga mendapat perhatian dari seorang feminis Belanda Aletta Jacobs (1912) yang merupakan dokter perempuan pertama dari Belanda, menyatakan kekagumannya pada budaya di Indonesia yang sudah memberikan hak pilih bagi perempuan yang dikonsolidasikan melalui hukum adat. Bahkan beliau menyatakan, bahwa perempuan-perempuan Indonesia lebih sangat maju pada persoalan hak pilih politik dibandingkan perempuan-perempuan di Eropa. Hal tersebut didasarkan pada pengamatan beliau yang berkunjung ke Indonesia dan mengamati fenomena bahwa 'seorang janda yang dicerai atau janda pemilik tanah dapat memilih pemimpin adatnya baik secara langsung maupun diwakilkan (Blumberger, 1987,p.151). Sebenarnya jelas sekali bahwa secara konseptual dalam sejarah dan budaya politik di Nusantara, perempuan telah memainkan peran dan posisi yang signifikan dalam membangun relasi gender dimasyarakat, bahkan konstruksi gender tersebut, memberikan pengaruh pada lahirnya pemimpin-pemimpin perempuan dari setiap dekade zaman, dimana bahwa peran dan posisinya sudah tidak bisa diragukan lagi dalam struktur politik bahkan para perempuan tersebut bisa mengukir sejarah panjang pada kontribusinya dalam perjuangan politik di Indonesia, Sayangnya menurut Antony Reid (Reid, 1988), historiografi Indonesia hanya memberikan sedikit perhatian terhadap pengakuan tentang peran politik perempuan yang terlibat dalam proses distribusi kekuasaan, terlebih lagi pada zaman penjajahan Kolonial dan penjajahan Jepang, peran perempuan sengaja dikaburkan dari sejarah peradaban bangsa.

Padahal Peran politik perempuan dalam struktur politik di Indonesia merupakan salah satu bagian sejarah panjang yang tidak bisa dipungkiri bahwa kaum perempuan juga berkontribusi pada distribusi kekuasaan. Sebelum gagasan-gagasan emansipasi muncul di awal abad 20 melalui pemikiran dari Raden Ajeng Kartini, fakta sejarah membuktikan, bahwa di Indonesia telah ada beberapa perempuan yang mempunyai kedudukan, wewenang, dan peran politik tertinggi di Nusantara. Hal tersebut dibuktikan dengan penelitian dari P.J. Veth, seorang sejarawan dan etnologi dari Belanda, bahwa di Kerajaan Aceh Darussalam pada 1691-1644 selama kurun waktu 60 tahun, telah di diperintah secara berturut-turut oleh empat orang Sultanah (Ratu), salah satu Sultanah yang terkenal memerintah Kerajaan Aceh Darussalam yaitu *Sultanah Safiatuddin Syah* yang merupakan putri tertua dari *Sultan Iskandar Syah* (Hamidah, 2008, p. 9).

Selain di Aceh dan Sulawesi Selatan, di Sumatera Barat juga pernah diperintah oleh seorang raja perempuan yang bernama *Bundo Kanduang* yang memerintah di istana Pagaruyung. *Bundo Kanduang*

(Erfira, 2011) merupakan raja perempuan yang sangat berpengaruh meletakkan dasar-dasar pemerintahan matrilineal di Minangkabau, bahkan ketikan anak laki-laki nya yang bernama *Dang Tuangku* memerintah menggantikannya, *Dang Tuangku* selalu bersandar kepada kebijaksanaan dari *Bundo Kanduang* yang memegang kendali kekuasaan yang berpusat kepada dirinya, sehingga *Dang Tuangku* sangat segan dan menghormati *Bundo Kanduang* (Amaliatulwalidain, 2012, p. 45). Kekuatan dan kekuasaan politik dari *Bundo Kanduang* yang melegenda tersebut, tertuang dalam tulisan cerita sastra Minangkabau "*Kaba Cinduo Mato*" bahwa peletak dari dasar sistem matrilineal di Sumatera Barat adalah *Bundo Kanduang* (Blackwood, 1995, p. 126).

Sedangkan di Palembang, Sumatera Selatan, peran politik perempuan, terlihat dari kemunculan kompilasi Hukum tertulis yang bernama Undang-undang Simbur Cahaya, yang merupakan aturan hukum tertulis bagi kehidupan masyarakat Palembang kala itu. Hadirnya Undang-undang Simbur Cahaya tidak bisa dilepaskan dari kontribusi Ratu Sinuhun (1616-1628) yang merupakan permaisuri dari Pangeran Sido Ing Kanayan. Ratu Sinuhun dikenal sebagai perempuan cerdas yang berhasil mengatur pemerintahan serta membuat peraturan hukum bagi kelangsungan hidup masyarakat di Palembang, sehingga untuk menghormati jasa-jasanya, maka Undang-undang Simbur Cahaya kemudian dipakai sebagai landasan yuridis kesultanan Palembang dan tetap dipertahankan sebagai rujukan hukum adat hingga kini (Farida, 2011, p.2)

Dari paparan diatas, serta didasarkan pada fakta sejarah tersebut, membuktikan bahwa kaum perempuan diberbagai wilayah kepulauan di Nusantara ini, mempunyai peran politik yang sangat signifikan di segala bidang kehidupan, bahkan mereka sudah terlibat dalam distribusi kekuasaan, apabila di ukur, kemampuan dari peran politik perempuan pada masa tersebut, bahkan telah melampaui kemampuan peran politik perempuan pada masa sekarang, selanjutnya untuk memahami lebih lanjut lagi sejauh mana peran politik perempuan di Indonesia pada fase selanjutnya, maka akan dibahas secara bertahap pada tulisan selanjutnya, yang terbagi dalam berbagai tahapan peran politik perempuan di Indonesia di setiap dekade pemerintahan.

2. Pembahasan

A. Peran Politik Perempuan : Periode Orde Lama 1945-1960

Setelah Indonesia merdeka, kekuasaan negara juga secara fundamental mempengaruhi hubungan antara perempuan dan laki-laki. Kaum perempuan berusaha mempertahankan kepentingan mereka melalui persaingan dengan kaum politisi lelaki dan bukan lagi bersama-sama menghadapi penjajahan. Selama perjuangan anti kolonial, kaum perempuan juga menjadi pelaku yang vokal diarena politik sekaligus menjadi ibu dan istri yang 'baik'. Dalam kenyataannya, dua tugas tersebut menyatu karena perempuan perlu memainkan

peran politiknya agar dapat menjadi ibu yang baik (bagi rakyat dan bangsa) dan istri yang baik pula bagi perjuangan kaum lelaki.

Pada periode ini, setelah kemerdekaan di raih, perbedaan ideologi gerakan perempuan semakin meningkat, akibatnya gerakan perempuan masa Orde Lama menjadi semakin berbeda-beda, secara internal pun beragam, terlebih lagi bermunculan 'sayap-sayap' perempuan dari partai politik yang umumnya dipimpin laki-laki menjelang Pemilu 1955. Banyak gerakan perempuan lebih memilih bekerja sama dengan Partai politik dari pada sesama gerakan perempuan lainnya.

Pada era ini, aktifitas gerakan perempuan tidak hanya dipengaruhi oleh semangat nasionalisme tetapi juga pada era ini, wacana nasionalis tentang kewarganegaraan perempuan mulai diperdebatkan, gerakan perempuan mulai mempertanyakan posisi mereka dalam nasionalisme, mereka tidak hanya ingin bertindak sebagai ibu atau pendamping laki-laki (istri), mereka sepenuhnya ingin terlibat dalam struktur politik, terlebih lagi setelah terjadi perubahan politik pasca kemerdekaan, karena organisasi perempuan menganggap diri mereka sebagai bagian dari perjuangan nasional.

Imbasnya beberapa organisasi perempuan banyak berdiri lagi seperti Organisasi Perwari, Organisasi Barisan Buruh Wanita, Gerwis sebagai cikal bakal Gerwani dan sebagainya, melakukan kegiatan terbuka dan terang-terangan bahkan berdiri juga Partai Wanita Rakyat, satu-satunya partai perempuan yang pernah ada yang didirikan oleh Ny. Sri Mangunsarkoro. Partai Wanita Rakyat mengemban visi dan misi yang bersifat militan dengan prinsip pokok nasionalisme dan monogami (Wierenga, 2010, p.150).

Pada masa ini, organisasi perempuan yang paling menonjol adalah Gerwis yang kemudian berubah nama menjadi Gerwani. Gerwani merupakan salah satu organisasi perempuan progresif pada masa Orde Lama merupakan fusi dari enam organisasi perempuan, yaitu Rukun Putri Indonesia (Rupinda) dari Semarang, Persatuan Wanita Sedar dari Surabaya, Isteri Sedar dari Bandung, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwindo) dari Kediri, Wanita Madura dari Madura dan perjuangan Perti Republik Indonesia dari Pasuruan. Kongres penyatuan enam organisasi tersebut, dilaksanakan di Semarang pada tanggal 4 Juni 1950 (Mustika, 2007, p. 23).

Dalam merealisasikan nilai-nilai perjuangannya, Gerwis aktif menempuh politik anti imperialisme. Melalui konsolidasi dengan beberapa gerakan kepemudaan (Pemuda Rakyat), kaum tani, kaum buruh. Ditambah lagi dengan kedekatan Gerwani dan PKI kemudian menjadi gerakan perempuan yang benar-benar sadar politik. Impian untuk mewujudkan masyarakat sosialis tanpa penindasan dan diskriminasi terhadap perempuan diperjuangan oleh Gerwani dalam skala nasional, dibuktikan dengan dukungan penuh terhadap kebijakan peresiden Soekarno. Pada periode ini, perjuangan Gerwani lebih dititik beratkan pada persoalan-persoalan politik nasional dengan berpedoman pada garis yang sudah ditetapkan pada peraturan dasar,

yaitu : berjuang untuk hak-hak demokrasi, kemerdekaan nasional yang penuh perdamaian, disamping untuk hak-hak wanita dan anak-anak.

B. Peran Politik Perempuan Periode Orde Baru 1965-1998 : Sejarah Berdirinya Organisasi PKK Di Indonesia

Sejarah gerakan perempuan Indonesia telah melalui jalan yang panjang. Pada tahun 1912 organisasi perempuan Putri Mahardika berdiri, dan pada tahun 1920 kemudian semua organisasi perempuan berkumpul dalam mengkonsolidasikan peran politik mereka dalam nasionalisme perjuangan kemerdekaan melalui tujuan dan cita-cita politik bersama dalam satu organisasi perempuan Indonesia (PPII) . Landasan tersebut kemudian menjadi kekuatan bagi organisasi perempuan (Perwari) yang perjuangannya tidak bisa dihilangkan dalam memperjuangkan kemerdekaan pada periode penjajahan hingga periode Orde Lama berkuasa. Masyarakat Indonesia, atau lebih tepatnya politik Indonesia mengalami perubahan “radikal” setelah tahun 1965. Pada 1950, lima tahun setelah penyerahan kemerdekaan, Indonesia memasuki masa Demokrasi Liberal. Inilah satu-satunya pengalaman Indonesia dengan sejenis Demokrasi Parlementer dalam sejarah politiknya. Berlangsung tidak lebih dari delapan tahun, demokrasi Liberal digantikan oleh demokrasi Terpimpin (1957-1965) karena demokrasi Liberal dianggap gagal , memecah-belah, memajukan gagasan mengenai oposisi serta menyebabkan ketidakstabilan politik, dan berasal dari Barat (Suryakusuma, 2011, p 13)

Pada akhir demokrasi Terpimpin, politik Indonesia didominasi oleh Golkar (Golongan Karya, golongan fungsional), “partai” bentukan angkatan darat yang pada kenyataannya bertugas melakukan depolitisasi. Setelah pengambilalihan kekuasaan oleh militer pada tahun 1965, terjadi perubahan nyata dalam politik Indonesia. Setelah kegagalan kudeta 1965, terjadi “pembersihan golongan komunis oleh militer yang bersekutu dengan anasir-anasir anti komunis (golongan muslim radikal, mahasiswa, intelektual, dan fraksi-fraksi militer). Setengah juta anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dibantai, pada aktivis dan anggota organisasi-organisasi yang bertalian dengan PKI dipenjara tanpa diadili, sedangkan dinas pemerintahan dan angkatan darat dibersihkan dari ‘unsur-unsur’ kiri. Keseimbangan yang rapuh diantara kelompok-kelompok keagamaan terutama Islam, nasionalis, komunis seta Angkatan Darat mengalami guncangan. Jenderal Soeharto mengambil alih komando, dan sejak saat itu Indonesia mengalami kekuasaan militer pada tingkatan yang belum dikenal sebelumnya (Suryakusuma, 2011)

Pada fase ini, Perubahan yang terjadi dalam sejarah politik di Indonesia setelah komando politik diambil alih oleh Jenderal Soeharto, maka sejarah politik Indonesia memasuki babak baru pemerintahan yang kemudian dikenal dengan “Rezim Orde Baru”. Rezim Orde Baru menjadi penanda terjadi peralihan kekuasaan dari kekuasaan sipil menjadi kekuasaan militer (Suryakusuma, 2011). Pada Rezim ini, terjadi perubahan massif pada struktur kelembagaan negara dengan

penyalahgunaan kekuasaan secara sistematis demi menciptakan kestabilan politik. Rezim Orde Baru menciptakan kebijakan kerja sama bagi penanaman modal dan bantuan asing guna pencapaian ekonomi yang padat modal, berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi dengan bantuan modal Barat sebagai landasan utama keabsahan politik. Konsep dasar politik Orde Baru terdiri atas stabilitas politik, teknokrasi dan efisiensi birokrasi dengan seruan pada perjuangan pemerintahan adalah “pembangunan nasional”, “stabilitas nasional”, “anti komunis” serta “asas kekeluargaan” yang menjadi dasar Undang-undang Dasar 1945, kemudian Rezim Orde Baru dikenal dengan sebutan “otoritarianisme pembangunan” (Suryakusuma, 2011, p 14).

Selain itu juga, perubahan tersebut juga mencerminkan surutnya peranan partai-partai politik setelah tahun 1965. Pemerintahan Rezim Orde Baru sengaja mempersempit wilayah bagi kelompok-kelompok yang menimbulkan kontroversi politik. Rezim ini, berhasil mengarahkan perhatian masyarakat pada masalah-masalah pembangunan ekonomi (. Salah satu penanda perubahan politik di era tersebut, adalah peningkatan dan penekanan ideologis secara tersruktur melalui penataran “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) pada tahun 1978. Dalam masing-masing periode peningkatan penekanan ideologis tersebut, disasarkan pada sejumlah golongan sebagai sasaran utama, seperti : Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), pegawai negeri, kaum profesional, pegawai dari sektor swasta serta sejumlah pemuka desa (Feith & Lance Castles, 1988, p. xxii).

Melalui kudeta 1965 perubahan politik secara alamiah terjadi yang mempengaruhi *mainset* perjuangan organisasi-organisasi perempuan, apabila pada tahun-tahun sebelumnya, organisasi perempuan banyak memberikan perhatian pada pendidikan, kerja sosial, perburuhan dan perdagangan perempuan, pada dasarnya 1950 hingga 1965 an perjuangan organisasi perempuan kemudian merambah isu pada di pedesaan. Melalui berbagai kegiatan yang dikhususkan menjangkau kaum perempuan di desa. Pergantian sistem pemerintahan Orde Lama yang sebelumnya memberikan peluang bagi kebebasan gerakan perempuan dalam pertarungan politik kenegaraan menuju sistem baru yang menempatkan perempuan pada wilayah privat/domestik. Perubahan posisi gerakan perempuan ini disebabkan sistem baru mendasarkan pada stabilitas politik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya. Melalui stabilitas politik itulah, Orde Baru menggiring seluruh kelompok kepentingan dan elemen masyarakat memasuki kehidupan dengan warna a-politis termasuk juga perempuan (Mustika Sari, 2007, p 5).

Stabilitas politik rezim Orde Baru (Mas’oed, 1971) , yang dibentuk atas ideologi pembangunan yang telah hadir pada tahun 1960-an dan dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran barat didasarkan pada beberapa dasar teoritis, yaitu pembangunan ekonomi, bebas dari konflik ideologi serta didasarkan pada nilai-nilai modernitas sekuler (pragmatisme, rasionalisme,

ketertiban dan keahlian praktis). Ideologi pembangunan sebagai sistem politik Orde Baru dengan sengaja, memaksa dan mengarahkan masyarakat pada 'penyuksesan ideologi besar menuju pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya (Mustika Sari, 2007, p. 7). Dalam prakteknya ideologi pembangunan dari sistem politik Orde Baru tidak hanya memaksa rakyat untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, melainkan juga menjadi landasan dalam menciptakan ketertiban umum yang bermuara kepada terciptanya stabilitas politik di Indonesia.

Untuk menciptakan ketertiban umum demi kestabilan politik, pemerintah Orde Baru berkeberatan apabila rakyat berbicara soal isu-isu politik, dengan melakukan penolakan terhadap tuntutan-tuntutan politik masyarakat kelas bawah serta menyingkirkan pemimpin rakyat dari kedudukan politik yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan dari negara (Budiman, 1991). Rakyat hanya ditugaskan untuk terus bekerja dan mensukseskan pembangunan. Pemerintah Orde Baru melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap semua organisasi, perkumpulan, menjalankan kekuasaan gender melalui otoritas kebijakan yang sangat patriarki dengan mengawasi secara ketat setiap organisasi wanita pada perencanaan dan kontrol pada "model keluarga". Kekuatan gender diopresi secara diskursif dengan mengarahkan pada "citra feminitas" bahwa perempuan Indonesia sebagai bawahan laki-laki dalam keluarga dan negara dengan kewarganegaraan utama mereka hanya sebagai 'istri dan ibu'. Dengan kewarganegaraan tersebut, representasi dan peran perempuan dibatasi pada kehidupan publik hanya sebagai 'istri dan ibu' yang didukung langsung oleh sistem politik dan diasumsikan sebagai pemberian Tuhan atas fungsi kodrat mereka (perempuan) yang membedakan dengan kaum lelaki. (dikutip dari Robinson, 1986, dalam Robinson, 2008, p. 68).

Konstitusi pun dibangun melalui model disiplin militer dan model patriarki pada setiap segmen dan sendi-sendi pembangunan ala Orde Baru, yang menciptakan kondisi khusus, dimana perempuan harus memainkan peran mereka sebagai 'istri dan ibu' melalui kodrat perempuan sebagai pengasuh dan pendidik generasi muda (Blackburn, 2004, p. 27). Pemujaan pada sifat 'keibuan' pun sengaja dilakukan oleh rezim Orde Baru melalui peran tradisional perempuan. Penormaan pada nilai-nilai keluarga batih pun gencar dilakukan sebagai norma yang ideal. Perempuan disegregasikan ke dalam program-program yang khusus untuk perempuan. Negara menciptakan organisasi isteri yang wajib diikuti, meniru hirarki suami, hal ini mencerminkan gagasan bahwa perempuan didefinisikan untuk melayani suami, keluarga, dan negara yang di kenal dengan gagasan ideologi 'state ibusme' (Suryakusuma, 2011, p. 11).

Pengarahan pada program perempuan sengaja dilakukan dari pemerintah pusat. Dimana struktur hirarkie dimulai dari presiden sampai ibu kades (istri kepada desa) di desa-desa. Ideologi Ibusme negara ini sangat feodalistik baik dalam struktur, hirarki, maupun prosesnya yang tidak demokratis. Statuslah yang

dijadikan orientasi utama dan penghormatan diberikan kepada perempuan yang mendapat kedudukan dalam organisasi karena posisinya sebagai isteri, bukan karena prestasinya sendiri. Perempuan diberi kegiatan-kegiatan yang seolah-olah memberi mereka arti penting dan 'status' (Suryakusuma, 2011, p. 12).

Agar pengarahan program perempuan bisa berjalan dengan baik, pemerintah Orde Baru melakukan pemobilisasian pada gerakan-gerakan perempuan yang dipaksa untuk mendukung tujuan pembangunan selain itu juga Orde Baru dengan sengaja secara resmi mendirikan organisasi-organisasi perempuan yang berhubungan erat dengan *mainset* program pembangunan Orde Baru seperti Dharma Wanita (diperuntukkan bagi istri pegawai negeri), Dharma Pertiwi (diperuntukkan bagi istri anggota militer) dan PKK (diperuntukkan bagi perempuan di pedesaan) (Suryakusuma, 2011, p. 20).

Berbeda dengan Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi yang anggota adalah pada istri dari pegawai pemerintahan, organisasi PKK yang merupakan singkatan dari Pembinaan Kesejahteraan Keluarga adalah organisasi perempuan yang didirikan khusus bagi kalangan perempuan bawah pedesaan (akar rumput). Berawal dari seminar awal tentang ekonomi rumah tangga di Bogor pada tahun 1957 sebagai dasar pembentukan PKK, kemudian pada tahun 1973 PKK kemudian dilembagakan, diperkuat dan diperluas diseluruh Indonesia (Newberry, 2013, p. 153). selanjutnya PKK sebagai organisasi resmi perempuan akar rumput dipedesaan pada perkembangannya dianggap sebagai organisasi yang memiliki implikasi ekonomi dalam usahanya meningkatkan keberlangsungan perekonomian perempuan di pedesaan melalui berbagai program yang mendapatkan pembinaan langsung dari Departemen Dalam Negeri dan mendapatkan tunjangan dana tahunan dari pemerintah (Suryakusuma, 2011, p. 21). Sejalan dengan tersentralisasinya negara Orde Baru, pengarahan untuk program organisasi PKK semua berasal dari pemerintah pusat, sruktur hiraerarkinya dimulai dari presiden sampai ibu kades (isteri kepala desa) di desa-desa.

Adapun program-program PKK yang merupakan turunan dari program pembangunan Orde Baru, kemudian dirangkum dalam 'kesepuluh program PKK' atau biasa yang disebut dengan 'Dasawisma', yaitu program-program yang diperuntukkan bagi kalangan perempuan akar rumput (pedesaan). Kesepuluh program tersebut dirancang dan sangat dekat kehidupan perempuan sebagai masyarakat rumah tangga. Berikut kesepuluh program organisasi PKK : (1). Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. (2). Gotong Royong, (3). Pangan, (4). Pangan, (5). Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga, (6). Pendidikan dan Ketrampilan, (7). Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, (8). Kesehatan, (9). Kelestarian Lingkungan Hidup, (10). Perencanaan Sehat (Soetjipto & Shelly Adelina, 2013, p. 51-61).

3. Kesimpulan

Sejak tahun 2010, pada Rakernas ke VII PKK, terjadi perubahan menarik pada organisasi PKK, apabila sebelumnya PKK merupakan singkatan dari “Pembinaan Kesejahteraan Keluarga”, kemudian berubah menjadi “Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga”. Perubahan yang terjadi pada organisasi PKK merupakan sejarah penting yang memberikan gambaran aktual tentang keberadaan dan posisi dari organisasi PKK sebagai manifestasi dari organisasi wanita yang keberadaannya dapat menjangkau akses hingga ke pelosok pedesaan dan bertahan hingga saat ini. Perubahan pada organisasi PKK tidak terjadi begitu saja, melainkan perubahan terjadi karena imbas dari perubahan politik. Pasca kejatuhan Orde Baru, perubahan politik yang terjadi memberikan dampak massif pada perubahan kondisi organisasi PKK di Indonesia.

Perubahan nama PKK, dari “*pembinaan*” menjadi “*pemberdayaan*” secara filosofis mengarah pada pembentukan ‘makna’ baru tentang organisasi PKK pasca Orde Baru runtuh. “*Pembinaan*” dianggap sebagai bahasa khas politik Orde Baru untuk mengatakan pengarah dan pengontrolan yang dilandasi oleh kepentingan, ketahanan nasional dalam rangka mengamankan pembangunan muaranya adalah pada ‘kesejahteraan keluarga’ melalui pembinaan lebih awal kepada kaum perempuan sebagai ‘ibu’, karena melalui peran ibu lah kontrol politik Orde Baru dapat dibentuk, berkembang dan dipelihara “*Pemberdayaan*” selanjutnya dianggap sebagai kata yang tepat untuk menggantikan kata “*pembinaan*” karena “*pemberdayaan*” lebih dianggap cocok untuk meneguhkan posisi dan peran organisasi PKK di era Reformasi, sebagai peneguhan sikap organisasi PKK sebagai mitra pemerintah untuk lebih berperan dalam proses demokratisasi. Melalui perubahan tersebut organisasi PKK tidak lagi dilihat dalam konteks tujuannya hanya sebagai mobilisasi kaum perempuan dalam proses pembangunan, melainkan melalui makna baru tersebut organisasi PKK dilihat sebagai konteks partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Daftar Pustaka

- Blackburn, Susan. 2004. *Women and the State in Modern Indonesia*, Cambridge : Cambridge University Press.
- Blumberger, Petrus, J Th. 1987. *De Nationalistische Beweging in Nederlandsch-Indie (1931)*, Dordrecht : Foris
- Blackwood, Evelyn. 1995. “Senior Women, Models Mother and Dutiful Wives Managing Gender Contradictions in Minangkabau Village”, Aihwa Ong dan Michael G Peletz (Ed) . Los Angeles : University California Press,
- Groot, J de. 1991. *Conceptions and Misconceptions : The Historical and Cultural Context of Discussion on Women and Development*. Inggris : Essex

- Martono, Nanang. 2011. *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial*, Jakarta : Rajawali Press.
- Robinso, Kathryn. 2009. *Gender, Islam and Democracy in Indonesia*. London : Routledge.
- Ritzer, Gorge & Douglas. J. Goodman. 2014. *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Muktahir Teori Sosial Postmoderen*. Yogyakarta : Kreasi Wacana.
- Sari, Mustika Ratna. 2007. *Gerwani, Stigmatisasi Dan Orde Baru*. Yogyakarta : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM.
- Sevilla, G.Convelo. 1993. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : UII Press
- Soetjipto, Ani & Shelly Adelina. 2012. *Partai Politik Dan Strategi Gender Separuh Hati : Pembelajaran dari Pengalaman Tiga Partai Pemenang Pemilu 2009*, Jakarta : Parintesis Publisher.
- Soetjipto, Ani. 2012. “Perempuan dalam Politik Formal : Perdebatan Kajian Teori Feminis”, Dalam *Jurnal Perempuan Vol 17.No 4* Desember 2012, Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan.
- Soetjipto, Ani & Shelly Adelina. 2013. *Suara dari Desa Menuju Revitalisasi PKK*, Jakarta : CV Margin Kiri.
- Subhan, Zaitunah. 2004. *Perempuan dan Politik Dalam Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pesantren..
- Suryakusuma, Julia. 2011. *Ibuisme Negara : Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*, Jakarta : Komunitas Bambu.
- Wieringa, E Saskia. 2010. *Penghancuran Gerakan Perempuan Politik Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI*, Yogyakarta : Galang Press.
- Vreede-De Steurs, Cora, (1960) *The Indonesian Woman, Struggles and Achievements*. Den Hagg : Mouton

Jurnal

- Farida. 2011. *Simbur Cahaya Sebagai Perikat Budaya Masyarakat Sumatera Selatan*. Makalah Ilmiah pada ‘Dialog Persiapan Kongres Kebudayaan’. Pontianak, Kalimantan Barat.
- Yenrizal, dkk. 2015. *Makna Simbolik Sawah di Masyarakat Pedesaan Tinjauan Komunikasi Lingkungan Pada Masyarakat Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim-Sumatera Selatan*. UGM : Jurnal Kawistara, Volume 5 No 3.

Tesis

- Amaliatulwalidain. 2012. *Dari Representasi Substantif ke Representasi Deskriptif (Studi Tentang Dinamika Peran Bundo Kanduang di Sungai Rimbang, Sumatera Barat*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.